

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari tulisan ini, peneliti menggarisbawahi bahwa Partai NasDem sebagai salah satu kekuatan politik yang muncul pasca-reformasi, kini tengah mendapatkan perhatian dalam proses kandidasi untuk pemilu 2024. Hal ini terutama karena keputusan partai tersebut mencalonkan kandidat presiden yang bukan berasal dari internal partai. Keputusan partai ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden menandai langkah politiknya yang cenderung pragmatis. Keputusan tersebut diyakini karena NasDem tidak memiliki kader yang *marketable* dan bisa bersaing pada tingkat nasional. Oleh karena itu, NasDem mempertimbangkan popularitas dan rekam jejak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Peneliti melihat bahwa proses pencalonan Anies Baswedan terdapat dua motif, yakni secara terbuka dan tertutup. Dalam motif tertutup, NasDem melakukan komunikasi internal sebelum adanya pengumuman resmi. Pada prosesnya NasDem memberikan tiga penawaran kepada Anies, yaitu sebagai cawapres dengan Ganjar, sebagai capres dengan NasDem sebagai partai pengusung utama, dan kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada akhirnya, NasDem memutuskan untuk menjadikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Keputusan ini diambil sebab penawaran Surya Paloh mengenai rencana duet antara Ganjar dan Anies tidak disambut baik oleh pihak PDI-P sebagai partai yang menaungi Ganjar dan Presiden Jokowi. Dibalik rencana tersebut, ternyata Surya Paloh memiliki tujuan yang baik, rencana duet antara Ganjar dan Anies merupakan sebuah upaya rekonsiliasi pasca terpecah belahnya bangsa kita pada saat pemilu 2024.

Dalam motif terbuka, proses pencalonan kandidat presiden partai NasDem dilakukan melalui penjaringan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). Dalam RAKERNAS, setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mengusulkan tiga nama calon presiden. Dari proses ini, muncul tiga nama yang paling banyak diusulkan

oleh DPW, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketiga nama ini kemudian diserahkan kepada Ketua Umum, Surya Paloh. Surya Paloh memiliki hak prerogatif untuk memilih satu dari ketiga nama tersebut. Setelah melalui proses panjang dan pertimbangan matang, Partai NasDem akhirnya memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Partai NasDem melihat Anies sebagai sosok yang memiliki keyakinan dan pemikiran yang sejalan dengan visi dan misi partai, baik dari perspektif makro maupun mikro.

Disisi lain, pencalonan Anies Baswedan menimbulkan friksi internal dan polemik eksternal pada partai NasDem. Adanya friksi internal yang muncul akibat perbedaan pandangan terhadap pencalonan Anies Baswedan. Perbedaan ini muncul karena ketidaksesuaian pandangan antara Anies dengan platform dan ideologi partai. Hal ini terlihat pada NasDem, yang memiliki ideologi nasionalisme, memilih Anies sebagai calon presiden yang memiliki rekam jejak memainkan politik identitas serta didukung oleh kelompok islam fundamentalis selama Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal tersebut dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh NasDem. Friksi ini menyebabkan sejumlah kader Partai NasDem di tingkat pusat maupun daerah memilih untuk mengundurkan diri.

Menurut peneliti, friksi yang terjadi tidak berdampak besar bagi internal partai NasDem dalam menghadapi pemilu 2024. Hal ini didukung oleh fakta jika kader yang mengundurkan diri dari NasDem tidak membawa gerbong yang besar. Dalam hal ini, NasDem mampu mengendalikan konflik internal dengan baik. Terlihat dari respon NasDem yang mewajarkan kadernya keluar karena berbeda pandangan. Peneliti membantah anggapan bahwa Anies Baswedan tidak selaras dengan platform dan ideologi Partai NasDem. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Surya Paloh yang mengatakan bahwa pemikiran dan pandangan yang dimiliki Anies, baik dalam konteks makro maupun mikro sejalan dengan visi dan gagasan NasDem. Terdapat kesesuaian antara pemikiran Surya Paloh dengan pandangan Anies tentang arah pembangunan dan perubahan yang dibutuhkan bagi kemajuan bangsa. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan Surya Paloh terhadap Anies tidak hanya bersifat politis, tetapi juga didasarkan pada konsistensi ideologis dan kesamaan visi atas perubahan yang diinginkan bagi masyarakat.

Kemudian, peneliti menilai bahwa polemik eksternal yang terjadi pasca pencalonan Anies Baswedan oleh partai NasDem memperparah persiapan Anies dan NasDem pada pemilu 2024. Keputusan ini memicu ketegangan, mengingat Anies sering dianggap memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Jokowi. Hal ini juga disebabkan oleh beban koalisi Partai NasDem pada pemilu sebelumnya. Posisi NasDem pada pemilu 2014 dan 2019 mendukung penuh pemerintahan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Akan tetapi, pada pemilu 2024 NasDem mencalonkan Anies Baswedan dengan gagasan utamanya adalah perubahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan upaya *State Intervention* kepada Partai NasDem.

State Intervention tersebut dianggap ditandai dengan upaya pemerintah menjatuhkan hukuman kepada kader NasDem yang terlibat dalam kasus korupsi saat menjabat sebagai menteri di era Jokowi. Jhony G Plate kader NasDem yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terjerat kasus korupsi menara BTS. Kemudian, Syahrul Yasin Limpo kader NasDem yang menjabat sebagai Menteri Pertanian (Kementan) terjerat juga kasus korupsi. Dalam hal ini, tidak hanya merusak citra Partai NasDem, tetapi juga memberikan beban tambahan terhadap pencalonan Anies dalam pilpres dan dukungan suara partai dalam pileg. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa idealisme ketika diwujudkan dalam sikap dan pilihan politik sangat beresiko, seperti apa yang dilakukan oleh partai NasDem pada pemilu 2024.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Calon kandidat independen atau kandidat non-partai dalam tingkatan nasional akan sulit terwujud, berbeda jika kita bandingkan dengan tingkatan daerah. Mengingat aturan main yang sulit, berkaca pada aturan ambang batas pencalonan presiden yang harus dicapai. Fenomena pencalonan Anies Baswedan merupakan salah satu contoh tokoh non-partai yang bisa dicalonkan oleh satu koalisi perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan PKB. Fenomena ini mengindikasikan jika partai politik tidak memiliki kader yang *marketable* atau kader yang menjual, partai perlu mempertimbangkan potensi

untuk mengusung atau mencalonkan tokoh nasional yang tidak terafiliasi dengan partai yang memiliki dukungan luas di masyarakat.

Partai politik perlu mengadopsi pendekatan yang terbuka dan fleksibel dalam strategi pencalonan mereka. Dengan membuka peluang bagi tokoh-tokoh non-partai yang memiliki popularitas dan reputasi baik, partai politik dapat memperluas basis dukungan mereka. Pendekatan ini juga mencerminkan kepekaan partai terhadap keinginan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang tidak selalu berasal dari struktur internal partai, tetapi dari individu-individu yang lebih independen dan mungkin lebih dipercaya oleh publik.

Selain itu, partai politik perlu meningkatkan upaya kaderisasi dan rekrutmen internal untuk menghasilkan kader yang berkualitas, memiliki citra positif di masyarakat, dan mampu bersaing dalam kontestasi politik nasional. Berdasarkan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran praktis yang dapat diimplementasikan oleh semua partai politik, tidak hanya Partai NasDem, dalam hal proses kandidasi untuk pemilihan presiden.

Partai politik harus memperkuat fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik mereka. Dalam hal ini, meliputi upaya untuk membina kader-kader partai sejak dini agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang ideologi partai, platform partai, serta kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Dengan demikian, partai politik akan memiliki kader-kader yang siap untuk diusung sebagai calon pemimpin dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Selain itu, partai politik perlu memberikan perhatian khusus pada pengembangan dan peningkatan kemampuan kader mereka. Hal ini dapat direalisasikan melalui program pelatihan yang berkelanjutan, mencakup dengan pelatihan keterampilan kepemimpinan, serta pemahaman tentang isu di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, partai akan memiliki kader yang berkualitas dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta merancang kebijakan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang oleh partai tersebut.

Kemudian yang terpenting, partai politik harus mengidentifikasi dan mempromosikan kader yang marketable atau memiliki daya jual tinggi di mata pemilih. Dalam hal ini, menandakan memilih kader yang tidak hanya memiliki

kualitas dan integritas, tetapi juga memiliki popularitas dan daya tarik yang kuat di masyarakat. Dengan demikian, partai dapat meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilu dengan mengusung kandidat yang disukai dan didukung oleh publik, mengingat tidak semua partai politik di Indonesia memiliki kader yang menonjol ditingkat nasional.

5.2.2 Saran Teoritis

Sebagai saran teoritis, studi lanjutan yang menggunakan teori dan narasumber yang berbeda sangat penting bagi peneliti lain yang berminat pada tema yang serupa. Pendekatan ini akan memperkaya hasil penelitian dengan berbagai sudut pandang teori. Penelitian di masa depan diharapkan lebih komprehensif dengan cakupan yang lebih luas dan variasi narasumber yang lebih beragam, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.